

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan survei diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didapatkan presentase nilai sampah yang terkelola di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 sebesar 16,47%. Dengan presentase pengurangan timbulan sampah sebesar 8,99%. Jika dilihat dari data diatas maka presentase sampah yang terkelola di Kabupaten Sumenep belum memenuhi target. Presentase tiap Kecamatan:
  - a. Kecamatan Batang-Batang  
Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 9,12% dan Penanganan Timbulan Sampah 0,45%
  - b. Kecamatan Dungkek  
Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 10,11% dan Penanganan Timbulan Sampah 1,12%
  - c. Kecamatan Rubaru  
Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 9% dan Penanganan Timbulan Sampah 0,32%
  - d. Kecamatan Dasuk  
Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 11% dan Penanganan Timbulan Sampah 0,42%
  - e. Kecamatan Pasongsongan  
Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 8% dan Penanganan Timbulan Sampah 0,24%
  - f. Kecamatan Bluto  
Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 8% dan Penanganan Timbulan Sampah 0,24%
  - g. Kecamatan Saronggi  
Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 11,77% dan Penanganan Timbulan Sampah 0,35%

#### h. Kecamatan Talango

Pengurangan Timbulan Sampah sebesar 15% dan Penanganan Timbulan Sampah 0,32%

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berakibat pada tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Kurangnya partisipasi masyarakat sehingga belum mendukung pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat seharusnya bukan hanya sebatas pada penyediaan pewartannya saja, sedangkan pengumpulan sampah dari sumber ke TPA masih menjadi tanggungjawab pemda. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan.
3. Dengan membuat klasifikasi baru sistem penentuan tarif retribusi berdasarkan prinsip proporsional dan subsidi silang serta memperhatikan *willingness to pay* masyarakat akan meningkatkan pendapatan dari pengelolaan sampah, yang diharapkan dapat menyeimbangkan biaya dalam peningkatan pelayanan persampahan.
4. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan sampah, sehingga memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Sistem pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam proses operasional pengelolaan sampah saat ini. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih modern, dapat diandalkan dan efisien serta teknologi ramah lingkungan.
5. Penanganan sampah yang ideal di perkotaan adalah dengan cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan, juga menghasilkan kegunaan baru dan secara ekonomi akan mengurangi biaya penanganan sampah (konsep *zero waste*). Dari segi kebutuhan tenaga dan peralatan pengumpulan dan pengangkutan jelas akan menjadi lebih sedikit sehingga pemerintah daerah akan dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah serta mendapatkan *revenue* dari hasil pengelolaan sampah diluar retribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan pengelolaan sampah.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai masukan bagi pihak yang terkait dengan peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep melalui peningkatan kemampuan pembiayaan agar mencapai hasil secara optimal adalah sebagai berikut:

1. Perlu perubahan pada teknik operasional pengelolaan sampah, efisiensi pada sub sistem pengumpulan, sub sistem pengangkutan dan sub sistem pembuangan akhir yaitu dengan peningkatan pelayanan dengan cara mengganti TPS dengan *container*, sehingga pengangkutan “*door to door*” dapat dikurangi. Pengangkutan secara langsung bisa dilayani dengan motor roda tiga, sehingga lebih efektif dan efisien.
2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sesuai dengan perkembangan pembangunan yang akan berjalan seiring dengan berkembangnya Kabupaten Sumenep.
3. Diadakannya Bank Sampah setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Sumenep.